



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 3041-3050

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Representasi Kekuasaan dalam Teks Supersemar: Kajian Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak

Rahma Nur Latifah, Meyvia Kiara Mahirsah, Destia Ajeng Putri Pranata, Hanifullah Syukri
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

rahmalatifah2020@gmail.com, kiarameyvia@gmail.com, pranataajengg@gmail.com, hanifullahsyukri@stuff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menelaah representasi kekuasaan dalam teks Supersemar melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) berdasarkan kerangka teori Ruth Wodak. Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membangun, melegitimasi, dan menyampaikan otoritas politik dalam konteks sejarah Indonesia, khususnya pada periode transisi kekuasaan antara Soekarno dan Soeharto. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis fitur-fitur tekstual secara mendalam, termasuk pilihan leksikal, struktur sintaksis, serta strategi retorik yang berperan dalam pembentukan relasi kuasa. Analisis difokuskan pada identifikasi pola dominasi, persuasi, serta konstruksi posisi ideologis yang tersembunyi di balik penyusunan kalimat dan struktur argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks Supersemar tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga secara halus membingkai legitimasi politik melalui strategi mengonstruksi citra Soeharto sebagai pelaksana otoritas yang diperlukan demi stabilitas negara sekaligus mereduksi jejak pertanggungjawaban politik. Keunikan penelitian ini terletak pada penerapan AWK terhadap dokumen Indonesia yang memiliki signifikansi historis dan politis, sehingga menjembatani analisis linguistik dengan pembacaan sosial-politik. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian bahasa, sastra, dan pembelajaran dengan memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjadi sarana produksi wacana politik dan narasi sejarah. Selain itu, penelitian ini menawarkan implikasi pedagogis bagi pengajaran membaca kritis dan keterampilan analitis, menekankan urgensi kesadaran wacana dalam kurikulum bahasa dan sastra agar peserta didik mampu mengidentifikasi relasi kuasa, representasi ideologi, dan konstruksi makna dalam teks.

Kata kunci: Supersemar, Representasi Kekuasaan, Analisis Wacana Kritis, Ruth Wodak, Teks Politik

1. Latar Belakang

Bahasa merupakan instrumen sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk, mempertahankan, dan menegosiasikan kekuasaan (Fairclough, 1995). Dalam perspektif analisis wacana kritis, setiap teks mengandung relasi sosial dan ideologi yang mencerminkan posisi serta kepentingan tertentu. Oleh karena itu, bahasa tidak bersifat netral, melainkan menjadi medium di mana praktik kekuasaan dan dominasi ideologis diwujudkan (Wodak & Meyer, 2016; Suharyo et al., 2015).

Salah satu teks yang sarat dengan dimensi kekuasaan dan ideologi adalah *Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)*. Teks ini menjadi dokumen politik penting yang menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada tahun 1966. Dalam konteks sejarah politik Indonesia, *Supersemar* bukan sekadar surat perintah administratif, tetapi juga teks yang merepresentasikan legitimasi dan justifikasi politik di tengah situasi sosial yang genting pasca-G30S/PKI (Ricklefs, 2008). Melalui penggunaan bahasa yang formal, singkat, namun penuh makna politis, *Supersemar* menunjukkan bagaimana wacana dapat menjadi instrumen dominasi dan legitimasi kekuasaan negara (Amin, 2014; Purwoko, 2019).

Penelitian ini penting dilakukan karena kajian terhadap *Supersemar* selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek sejarah dan politik praktis, bukan pada aspek linguistik dan wacana kekuasaan di dalam teksnya. Padahal, pemaknaan terhadap teks sebagai representasi kekuasaan perlu dianalisis secara kritis melalui pendekatan bahasa dan konteks historis. Inilah yang menjadi celah (research gap) yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Dengan menganalisis *Supersemar* dari perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) model Ruth Wodak atau Discourse-

Historical Approach (DHA), penelitian ini berupaya menyingkap strategi linguistik dan diskursif yang digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan (Wodak, 2001; Reisigl & Wodak, 2009).

Secara teoritis, pendekatan Ruth Wodak menekankan pentingnya mengaitkan analisis linguistik dengan konteks sosial, politik, dan historis suatu wacana. Model ini melibatkan lima strategi utama, yaitu *nomination*, *predication*, *argumentation*, *perspectivization*, dan *intensification/mitigation* yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan relasi kekuasaan (Wodak, 2001). Dengan demikian, analisis terhadap teks *Supersemar* tidak hanya difokuskan pada bentuk bahasa, tetapi juga pada cara teks itu berinteraksi dengan peristiwa politik dan ideologi pada masa transisi Orde Lama menuju Orde Baru.

Dalam pandangan Norman Fairclough (1995), wacana tidak sekadar merepresentasikan realitas sosial secara pasif, melainkan juga aktif membentuk serta mempertahankan struktur kekuasaan melalui praktik bahasa tertentu. Bahasa dalam kerangka ini dipahami sebagai instrumen dominan yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa, tokoh, atau kebijakan publik. Di ranah politik, bahasa sering kali dimanfaatkan untuk menegaskan legitimasi kekuasaan, mbingkai oposisi sebagai ancaman, atau menormalisasi posisi dominan suatu kelompok. Sejalan dengan itu, Teun A. van Dijk (1998) menegaskan bahwa analisis wacana kritis menyoroti bagaimana kelompok dominan mempertahankan posisi mereka melalui strategi linguistik seperti pemilihan kata, struktur kalimat, serta bentuk penekanan tertentu dalam teks wacana publik. Dengan demikian, CDA memberikan ruang bagi peneliti untuk secara kritis menggali bagaimana wacana politik membentuk, melegitimasi, atau menentang relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa.

Pendekatan yang dikembangkan oleh Ruth Wodak, yaitu Discourse-Historical Approach (DHA), memperkaya kerangka CDA dengan menambahkan dimensi historis, sosial, dan intertekstual dalam analisis wacana. Wodak (2001) menegaskan bahwa analisis wacana tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan historis di mana suatu teks diproduksi dan dikonsumsi. Dalam kerangka DHA, terdapat tiga dimensi analisis utama, yaitu: (1) analisis teks, yang meliputi struktur linguistik seperti kosakata, metafora, nominalisasi, dan strategi retorik; (2) konteks intertekstual dan interdiskursif, yaitu keterkaitan teks dengan wacana lain yang mendukung atau menentangnya; dan (3) konteks sosial-historis, yakni latar sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi pembentukan teks. Lebih jauh, Wodak (2009) memperkenalkan lima strategi utama dalam mengungkap representasi kekuasaan melalui bahasa, yaitu *nomination* (penamaan/pelabelan aktor sosial), *predication* (pemberian sifat atau tindakan pada aktor), *argumentation* (pembangunan argumen untuk mendukung ide tertentu), *perspectivization* (penyajian sudut pandang dan evaluasi), serta *intensification/mitigation* (penguatan atau pelemahan suatu pernyataan). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam memetakan bagaimana ideologi dan kekuasaan direproduksi, dinegosiasikan, atau dikritisi melalui wacana.

Konsep representasi kekuasaan menjadi pilar penting dalam analisis wacana kritis. Representasi kekuasaan berkaitan dengan bagaimana wacana tidak hanya menggambarkan, tetapi juga mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Fairclough (2001) menegaskan bahwa kekuasaan dalam wacana tidak semata-mata bersifat koersif, melainkan juga ideologis yakni bekerja melalui proses pemaknaan yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang “alami” dan “wajar”. Dalam konteks teks politik seperti dokumen perintah pemerintahan, representasi kekuasaan muncul melalui pilihan kata, struktur kalimat, dan strategi legitimasi yang menempatkan tokoh atau institusi tertentu sebagai figur dominan atau sah secara moral. Dengan demikian, wacana politik tidak hanya mencerminkan kekuasaan, melainkan juga secara aktif membentuk pemahaman publik tentang siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan atas dasar apa kekuasaan tersebut dianggap sah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan model Ruth Wodak untuk mengkaji relasi kuasa dalam konteks sosial-politik Indonesia. Naufal, Nurhadi, & Anshori (2021) menganalisis wacana “Kadrun, KPK, dan Buzzer” di majalah *Tempo* yang menunjukkan bagaimana media mbingkai kekuasaan melalui strategi argumentasi dan nominasi. Anam, Yumna, & Miftahulhairah (2023) meneliti relasi kuasa dalam penamaan wilayah (*toponimi*) di Kota Bekasi dan menemukan adanya proses legitimasi melalui pilihan leksikal dan konteks historis. Rahma et al. (2025) mengkaji ideologi dalam konten TikTok generasi Z dan menemukan strategi prediksi serta mitigasi yang menegaskan relasi kuasa digital. Selain itu, Maharani et al. (2024) meneliti dominasi kekuasaan dalam film pendek *Please Be Quiet* dengan model Wodak, dan menemukan pembungkaman simbolik terhadap pihak subordinat. Keempat penelitian ini memperlihatkan bahwa model Wodak dapat diaplikasikan pada beragam teks dan medium, namun belum ada yang secara khusus mengkaji teks *Supersemar* sebagai dokumen politik yang menandai legitimasi kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah representasi kekuasaan dalam teks Supersemar melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Ruth Wodak. Permasalahan utama yang akan dijawab adalah: (1) bagaimana teks Supersemar merepresentasikan relasi kekuasaan antara Presiden Soekarno dan Letnan Jenderal Soeharto; (2) strategi diskursif apa yang digunakan untuk membangun legitimasi kekuasaan; dan (3) bagaimana framing serta intertekstualitas teks tersebut berhubungan dengan konteks sosial-politik masa peralihan 1966.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian linguistik kritis, khususnya dalam penerapan model Ruth Wodak pada analisis teks historis. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi studi bahasa, sejarah, dan politik Indonesia, terutama dalam memahami bagaimana bahasa berperan dalam membentuk persepsi publik dan mempertahankan legitimasi kekuasaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis model Ruth Wodak atau yang dikenal sebagai *Discourse-Historical Approach (DHA)*. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk mengungkap makna ideologis dan relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam teks politik (Kuntarto, 2018; Dwi Pangga et al., 2024). Melalui pendekatan ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk makna yang mampu mempertahankan, menegosiasikan, atau bahkan menantang struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, teks *Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)* dipahami sebagai sebuah wacana politik yang memuat pesan ideologis kuat dan berperan penting dalam proses legitimasi kekuasaan pada masa peralihan pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen teks Supersemar yang dikeluarkan pada tahun 1966. Teks ini menjadi pusat perhatian karena merepresentasikan dinamika kekuasaan dan perubahan politik nasional pada masa tersebut. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga melibatkan sumber data tambahan berupa teks sejarah, arsip, serta literatur akademik yang relevan. Sumber-sumber pendukung tersebut dipilih agar peneliti dapat memahami konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi lahirnya Supersemar, sekaligus memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan teks Supersemar. Jenis data yang dikaji mencakup: (1) naskah asli dan salinan teks Supersemar dari sumber-sumber resmi; (2) dokumen pendukung seperti artikel, berita, dan kajian ilmiah yang menjelaskan proses penerbitan serta dampak politik Supersemar; dan (3) catatan sejarah atau kajian politik yang menggambarkan situasi nasional pada pertengahan dekade 1960-an. Melalui proses dokumentasi ini, peneliti berupaya membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai konteks lahirnya Supersemar dan ideologi yang terkandung di dalamnya.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan *Discourse-Historical Approach* sebagaimana dikembangkan oleh Ruth Wodak. Tahap pertama adalah identifikasi konteks historis dan sosial, yakni menelusuri latar politik, ekonomi, dan sosial Indonesia saat Supersemar diterbitkan. Tahap kedua adalah analisis linguistik teks, yang berfokus pada pemilihan kata, struktur kalimat, dan strategi retorik yang digunakan untuk membentuk atau menutupi relasi kekuasaan. Tahap ketiga mencakup analisis strategi wacana berdasarkan lima kategori utama yang dikemukakan Wodak, yaitu *nomination*, *predication*, *argumentation*, *perspectivization*, dan *intensification/mitigation*. Melalui tahap ini, peneliti menelaah bagaimana kekuasaan direpresentasikan, dilegitimasi, atau bahkan dinegasikan dalam teks Supersemar. Tahap keempat adalah interpretasi ideologis, di mana hasil analisis linguistik dihubungkan dengan praktik sosial dan struktur kekuasaan yang melatarbelakangi teks. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang bertujuan merumuskan bentuk-bentuk representasi kekuasaan dan implikasi ideologi yang muncul dari wacana tersebut.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil analisis dibandingkan dengan berbagai literatur sejarah, politik, serta teori analisis wacana kritis lainnya seperti yang dikemukakan oleh Fairclough dan Van Dijk. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dan memastikan hasil analisis memiliki dasar teoritis yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan aspek linguistik dari teks Supersemar, tetapi juga menyingkap relasi ideologi dan kekuasaan yang beroperasi di baliknya.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Teks Supersemar, Konteks, dan Produksi Wacana Kekuasaan

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan dokumen politik yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno dan ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Surat ini berisi perintah kepada Soeharto untuk mengambil langkah yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara pascaperistiwa Gerakan 30 September 1965. Secara historis, konteks penerbitan *Supersemar* tidak dapat dilepaskan dari situasi krisis politik dan sosial saat itu: munculnya ketegangan antara presiden, militer, dan kekuatan politik sipil (Ricklefs, 2008; Crouch, 1985).

Dalam perspektif wacana, *Supersemar* dapat dipandang sebagai teks institusional yang tidak hanya menyampaikan instruksi administratif, tetapi juga meneguhkan relasi kuasa antara penguasa (Soekarno) dan pelaksana (Soeharto). Melalui struktur kalimat perintah dan diksi yang formal, teks ini membingkai legitimasi tindakan militer sebagai representasi “kehendak presiden”. Pemilihan kata “*mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan dan jalannya revolusi*” menunjukkan bentuk delegasi kuasa tanpa batas linguistik yang jelas. Secara diskursif, ini menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi penerima mandat, sehingga membuka jalan bagi pergeseran kekuasaan (Purwoko, 2019).

Analisis wacana kritis model Ruth Wodak (2001) menekankan bahwa teks tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan dimensi historis dan sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, *Supersemar* bukan hanya produk linguistik, tetapi juga produk sosial dari konflik ideologi pada masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Hal ini sejalan dengan temuan Anam et al. (2023) dalam kajiannya terhadap toponimi Bekasi, bahwa setiap praktik penamaan dan penyusunan teks administratif merefleksikan relasi kekuasaan antara institusi dan masyarakat. Dalam konteks ini, *Supersemar* berfungsi sebagai penamaan legitimasi politik, yakni teks yang secara simbolik “menamai ulang” otoritas pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto.

Jika dibandingkan dengan penelitian Naufal et al. (2021), yang menganalisis wacana *Tempo* tentang “Kadrun” dan KPK, keduanya memiliki kesamaan dalam aspek produksi wacana kuasa melalui media resmi. Dalam kasus *Tempo*, relasi kuasa ditampilkan lewat framing media terhadap pemerintah; dalam *Supersemar*, relasi kuasa dilembagakan lewat struktur kalimat dan legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, teks *Supersemar* merepresentasikan wacana transisi politik yang dikonstruksi melalui bahasa perintah dan pengalihan tanggung jawab, bukan melalui narasi konflik terbuka.

3.2. Representasi Kekuasaan dalam Teks Supersemar

Analisis terhadap teks *Supersemar* dengan model Ruth Wodak dilakukan melalui strategi diskursif yang terdiri dari *nomination*, *predication*, dan *argumentation* (Reisigl & Wodak, 2009). Pada tingkat *nomination*, aktor utama yang disebutkan adalah “Presiden Republik Indonesia”, “Letnan Jenderal Soeharto”, dan entitas generik “Negara Republik Indonesia”. Penyebutan jabatan (bukan nama pribadi) menunjukkan adanya strategi de-personalisasi untuk menegaskan otoritas institusional, bukan individual. Hal ini identik dengan temuan Rahma et al. (2025) bahwa wacana ideologis di media sosial juga menonjolkan representasi otoritas melalui bentuk penyebutan posisi, bukan personalitas, guna membangun legitimasi simbolik.

Pada tingkat *predication*, penggunaan kata-kata seperti “*mengambil segala tindakan yang dianggap perlu*”, “*menjamin keamanan dan ketertiban*”, dan “*jalannya pemerintahan dan revolusi*” menunjukkan predikasi positif terhadap tindakan militer dan predikasi pasif terhadap Presiden. Soekarno diposisikan sebagai pemberi mandat yang “percaya” dan “memberi kewenangan”, sementara Soeharto direpresentasikan sebagai pelaksana yang “bertindak demi stabilitas negara”. Ini adalah bentuk representasi hierarki kekuasaan yang secara linguistik menempatkan Soeharto sebagai figur penegak ketertiban dan Soekarno sebagai sumber legitimasi simbolik. Wacana seperti ini, menurut Fairclough (1995), merupakan strategi ideologis untuk mengalihkan otoritas dari figur formal ke figur operasional melalui struktur bahasa.

Sementara pada tingkat *argumentation*, teks *Supersemar* menggunakan *topos* “keamanan nasional” dan “kelangsungan pemerintahan” sebagai dasar rasional tindakan. Frasa “untuk menjamin keamanan dan ketertiban” berfungsi sebagai justifikasi linguistik yang menghalalkan penggunaan kekuatan militer. Temuan ini paralel

dengan hasil penelitian Maharani et al. (2024) tentang film *Please Be Quiet*, di mana wacana kekuasaan dibangun melalui legitimasi moral: tindakan represif dianggap benar demi “ketertiban sosial”.

Dengan demikian, representasi kekuasaan dalam teks *Supersemar* memperlihatkan adanya tiga lapisan ideologis utama: (1) otoritas presiden yang dilembagakan secara simbolik; (2) pelimpahan kuasa yang mengaburkan batas tanggung jawab; dan (3) legitimasi moral melalui wacana keamanan nasional. Teks ini menjadi contoh bagaimana bahasa birokratis dapat berfungsi sebagai alat transisi kekuasaan, sesuai dengan pandangan Wodak (2001) bahwa wacana politik selalu mengandung mekanisme reproduksi dan legitimasi ideologi kekuasaan.

3.3 Pendekatan Teoritis Ruth Wodak

Pendekatan Ruth Wodak atau *Discourse-Historical Approach* (DHA) menjadi kerangka utama dalam penelitian ini karena mampu menjembatani analisis bahasa dengan konteks sosial-historis yang melingkupinya. Wodak (2001) berangkat dari asumsi bahwa wacana selalu dibentuk oleh kondisi sosial, politik, dan ideologis tertentu, sehingga setiap teks merupakan hasil dari proses historis yang kompleks. Dalam konteks *Supersemar*, pendekatan ini relevan karena teks tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari situasi politik yang sarat ketegangan antara kekuasaan eksekutif, militer, dan ideologi negara pada pertengahan 1960-an.

Discourse-Historical Approach menekankan pentingnya melihat teks dalam tiga dimensi analisis, yaitu dimensi linguistik, intertekstual, dan sosial-historis. Dimensi linguistik berfokus pada struktur bahasa seperti pemilihan kata, metafora, nominalisasi, serta bentuk kalimat yang digunakan untuk membangun representasi makna tertentu. Dalam *Supersemar*, misalnya, penggunaan kata-kata seperti “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” menunjukkan strategi linguistik yang berfungsi memperluas cakupan kuasa sekaligus mengaburkan batas tanggung jawab. Dimensi ini membantu menyingkap bagaimana kekuasaan dibangun dan dilegitimasi melalui pilihan bahasa yang tampak netral namun sarat makna ideologis.

Dimensi intertekstual dan interdiskursif dalam model Wodak memandang bahwa teks selalu berhubungan dengan wacana lain yang mendahului atau mengikuti kemunculannya. *Supersemar*, dalam hal ini, berelasi erat dengan berbagai teks politik lain seperti pidato Soekarno, surat keputusan presiden, serta laporan militer yang beredar pada masa tersebut yang secara bersamaan membentuk narasi krisis dan kebutuhan stabilitas nasional. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun tidak hanya melalui satu dokumen, tetapi melalui jaringan wacana yang saling menguatkan.

Secara teoritis, Wodak mengidentifikasi beberapa strategi diskursif utama dalam menganalisis teks politik, yaitu:

1. Strategi nominasi (*nomination strategy*), yakni cara aktor atau entitas politik dinamai dan dikategorikan dalam teks. Dalam *Supersemar*, Soekarno disebut sebagai “Presiden/Pemimpin Besar Revolusi”, sedangkan Soeharto diberi peran sebagai pelaksana mandat, yang secara linguistik menempatkannya sebagai pihak yang “melaksanakan” kehendak atasan.
2. Strategi predikasi (*predication strategy*), yaitu atribusi nilai, sifat, atau karakter tertentu kepada aktor politik. Misalnya, diksi “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” memosisikan Soeharto sebagai figur yang rasional dan bertanggung jawab atas stabilitas negara.
3. Strategi argumentasi (*argumentation strategy*), yang berkaitan dengan pembenaran ideologis atau rasionalisasi tindakan. Dalam *Supersemar*, tindakan militer dilegitimasi melalui alasan “menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan”, yang berfungsi sebagai justifikasi moral terhadap tindakan politik selanjutnya.
4. Strategi perspektivisasi (*perspectivization strategy*), yaitu cara pandang dan posisi penulis teks dalam menyampaikan perintah. Soekarno menulis dari posisi otoritas tertinggi, tetapi secara linguistik menampilkan diri sebagai pihak yang memberi kepercayaan, bukan yang memaksakan perintah, sehingga membuka ruang interpretasi.
5. Strategi intensifikasi/mitigasi (*intensification/mitigation strategy*), yaitu cara memperkuat atau melemahkan pernyataan tertentu dalam teks. Dalam *Supersemar*, keharusan bertindak “segera” dan “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” menunjukkan intensifikasi terhadap urgensi dan legitimasi perintah.

Sementara itu, dimensi sosial-historis menjadi kunci dalam memahami fungsi ideologis *Supersemar*. Dalam perspektif DHA, teks tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan politik yang memproduksinya. Oleh karena

itu, analisis Supersemar perlu memperhatikan konteks pasca-G30S, ketegangan antara presiden dan militer, serta wacana “penyelamatan revolusi” yang digunakan untuk membenarkan tindakan politik tertentu. Melalui dimensi ini, penelitian dapat menelusuri bagaimana praktik bahasa dalam Supersemar berperan dalam proses transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Selain ketiga dimensi tersebut, Wodak (2009) juga menawarkan lima strategi analisis utama yang digunakan untuk mengidentifikasi representasi kekuasaan, yaitu *nomination*, *predication*, *argumentation*, *perspectivization*, dan *intensification/mitigation*. Dalam konteks Supersemar, strategi *nomination* terlihat dari cara Soekarno dan Soeharto diposisikan sebagai aktor utama: Soekarno sebagai pemberi mandat dan Soeharto sebagai pelaksana legitimasi. Strategi *predication* muncul melalui penggambaran Soeharto sebagai sosok yang bertugas “menjamin keamanan dan ketertiban”, yang memberi citra moral positif terhadap penggunaan kekuasaan militer. Adapun strategi *argumentation* tampak dalam logika tekstual yang membingkai tindakan militer sebagai “kewajiban konstitusional”, sedangkan *perspectivization* menunjukkan dominasi sudut pandang institusional negara dibandingkan suara publik. Strategi terakhir, *intensification/mitigation*, berperan dalam memperkuat atau melemahkan efek perintah presiden, sehingga menciptakan keseimbangan antara wacana otoritas dan tanggung jawab.

Dengan demikian, pendekatan Ruth Wodak memungkinkan penelitian ini untuk menafsirkan Supersemar tidak semata sebagai teks administratif, melainkan sebagai artefak wacana yang mengonstruksi dan meneguhkan relasi kekuasaan. Pendekatan ini membantu mengurai bagaimana bahasa berperan dalam membentuk legitimasi politik, membingkai tindakan militer sebagai bentuk tanggung jawab nasional, serta mereproduksi ideologi stabilitas yang menjadi fondasi awal Orde Baru.

3.4. Identifikasi Representasi Kekuasaan

Analisis terhadap teks Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) berdasarkan pendekatan Discourse-Historical Approach (DHA) yang dikembangkan oleh Ruth Wodak memperlihatkan bahwa representasi kekuasaan dibangun melalui strategi wacana yang sistematis dan kontekstual. Wodak (2001; 2009) menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui tindakan politik langsung, tetapi juga melalui praktik kebahasaan yang mereproduksi legitimasi ideologis. Bahasa menjadi instrumen sosial yang menstrukturkan hubungan antara otoritas dan legitimasi, sehingga melalui pilihan kata, struktur kalimat, serta konteks historisnya, suatu teks dapat menciptakan citra kekuasaan yang sah dan diterima.

Dalam teks Supersemar, representasi kekuasaan direalisasikan melalui lima strategi utama sebagaimana dikemukakan oleh Wodak, yaitu strategi penamaan (*nomination*), penggambaran (*predication*), argumentasi (*argumentation*), perspektivisasi (*perspectivization*), dan intensifikasi atau mitigasi (*intensification/mitigation*). Strategi-strategi ini berfungsi untuk menata peran aktor sosial, membangun citra moral, dan menjustifikasi tindakan politik tertentu dalam kerangka wacana legitimasi.

Pertama, melalui strategi penamaan, aktor sosial utama direpresentasikan dalam bentuk institusional, seperti “Presiden Republik Indonesia” dan “Letnan Jenderal Soeharto”. Penyebutan jabatan ini menunjukkan adanya impersonalisasi atau penghilangan identitas individu demi menegaskan otoritas kelembagaan. Soekarno tidak ditampilkan sebagai pribadi, melainkan sebagai simbol kekuasaan negara yang sah. Hal ini memperkuat pandangan Wodak (2001) bahwa nominasi institusional berfungsi memperkuat legitimasi politik karena membingkai kekuasaan sebagai milik lembaga, bukan individu.

Kedua, strategi penggambaran tampak melalui diksi yang menampilkan Soeharto sebagai figur rasional dan bertanggung jawab terhadap keamanan negara. Kalimat seperti “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan dan jalannya revolusi” menegaskan citra Soeharto sebagai pelaksana amanah dan penjaga stabilitas nasional. Sebaliknya, Soekarno digambarkan sebagai pemberi mandat yang mempercayakan kewenangan penuh kepada pelaksana militer. Penggambaran ini menunjukkan hierarki simbolik antara sumber legitimasi dan pelaku tindakan, di mana otoritas berpindah secara halus melalui struktur bahasa yang tampak administratif dan netral.

Ketiga, strategi argumentasi dalam teks Supersemar menggunakan topos keamanan dan kelangsungan pemerintahan sebagai dasar pembenaran tindakan. Argumen moral dan politis dibangun melalui ide bahwa segala tindakan Soeharto dilakukan demi menjaga ketertiban negara dan mempertahankan jalannya revolusi. Dengan

demikian, kekuasaan dilegitimasi bukan sebagai bentuk ambisi personal, tetapi sebagai kebutuhan nasional. Hal ini sejalan dengan konsep legitimasi diskursif yang dijelaskan oleh Wodak (2009), yaitu proses di mana kekuasaan diterima masyarakat karena dibingkai sebagai tindakan rasional dan moral, bukan dominasi.

Keempat, strategi perspektivisasi muncul dalam cara penulis teks, yaitu Soekarno, menempatkan dirinya dalam posisi yang memberi kepercayaan, bukan memaksakan perintah. Bahasa yang digunakan bersifat netral dan instruktif, menciptakan kesan hubungan kerja sama antara presiden dan pelaksana mandat. Melalui posisi wacana ini, teks memperkuat citra Soekarno sebagai pemimpin yang demokratis, sekaligus membuka ruang interpretasi bagi Soeharto untuk menafsirkan perintah tersebut sesuai kebutuhan politik saat itu.

Kelima, strategi intensifikasi dan mitigasi digunakan untuk menegaskan urgensi tindakan, sekaligus melemahkan kesan dominasi. Ungkapan “segala tindakan yang dianggap perlu” mengandung intensifikasi terhadap tanggung jawab moral dan mitigasi terhadap perintah presiden, sehingga menciptakan ambiguitas strategis. Ambiguitas ini, menurut Wodak (2009), merupakan bentuk kontrol simbolik yang memungkinkan kekuasaan berpindah tanpa konfrontasi terbuka.

Secara keseluruhan, identifikasi terhadap strategi wacana dalam teks Supersemar menunjukkan bahwa representasi kekuasaan dibangun melalui legitimasi simbolik, pelimpahan otoritas, dan pembenaran moral. Bahasa yang digunakan bukan sekadar alat komunikasi administratif, tetapi sarana ideologis yang menormalisasi peralihan kekuasaan melalui konstruksi wacana yang terencana. Dalam kerangka teori Ruth Wodak, Supersemar merupakan contoh konkret bagaimana teks politik berfungsi sebagai praktik sosial yang mengatur, mereproduksi, dan melegitimasi struktur kekuasaan.

3.5. Framing dan Intereksualitas; Teks Membingkai Keputusan / Perintah, Keterkaitan Teks dengan Dokumen lain / Kontes Sosial Politik, Implikasi Framing terhadap Legitimasi Kekuasaan

Dalam analisis wacana kritis, framing seperti didefinisikan oleh Robert Entman (1993) adalah proses selektif dalam memilih dan menonjolkan aspek-aspek realitas untuk membentuk interpretasi audiens, sering kali untuk memengaruhi opini atau legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka Discourse-Historical Approach (DHA) Ruth Wodak, framing tidak terisolasi; ia selalu terjalin dengan intertekstualitas, yaitu hubungan antar teks dan wacana yang membentuk makna sosial-politik (Wodak, 2001). Ini memungkinkan analisis holistik tentang bagaimana teks seperti Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) bukan sekadar dokumen, melainkan konstruksi diskursif yang membingkai transisi kekuasaan. Untuk memperkaya, tambahkan bahwa Wodak mengintegrasikan framing dengan teori Foucault tentang “regime kebenaran”, di mana wacana membentuk realitas melalui repetisi dan konteks historis. Dalam studi empiris, seperti analisis wacana tentang Holocaust atau nasionalisme Eropa, Wodak menunjukkan bagaimana framing bekerja untuk menormalkan ideologi dominan, mirip dengan Supersemar yang membingkai krisis politik sebagai penyelamatan revolusi.

Secara framing, Supersemar menggunakan struktur kalimat sederhana namun performatif tinggi untuk membangun legitimasi. Kalimat seperti “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban pemerintahan dan jalannya revolusi, menonjolkan aspek tanggung jawab dan kontinuitas, sambil menggerakkan potensi konflik. Ini menciptakan framing sebagai tindakan administratif harmonis, di mana Soekarno sebagai pemberi mandat dan Soeharto sebagai pelaksana digambarkan dalam narasi kooperatif. Untuk memperkaya, bandingkan dengan framing dalam wacana media: Entman (1993) menekankan bahwa framing melibatkan *salience* (penonjolan), seperti bagaimana Supersemar menekankan revolusi untuk menghubungkan dengan ideologi nasionalis Soekarno, sehingga mengurangi citra perebutan kekuasaan. Dalam DHA, ini sejalan dengan strategi Wodak seperti *predication* (penggambaran atribut positif), di mana militer diframing sebagai “penjaga stabilitas”, bukan aktor politik agresif.

Secara kritis, framing ini menutupi ketegangan ideologis melalui diksi netral dan instruktif, menciptakan ‘*strategic ambiguity*’ (ketidakjelasan strategis) yang memungkinkan interpretasi luas oleh Soeharto. Wodak (2009) melihat ini sebagai praktik diskursif kekuasaan, di mana *recontextualization* pemindahan makna dari konteks asli ke konteks baru mengubah Supersemar dari surat perintah sementara menjadi dasar hukum pengambilalihan wewenang. Untuk memperkaya, tambahkan contoh: Kata “dianggap perlu” memberikan fleksibilitas, mirip dengan framing dalam hukum internasional seperti Resolusi PBB yang ambigu untuk menghindari konflik. Dalam konteks Indonesia, ini memfasilitasi transisi tanpa konfrontasi langsung, seperti yang dianalisis Wodak dalam studi

tentang wacana otoritarian, di mana ambiguity digunakan untuk mempertahankan hegemoni sambil menghindari tantangan.

Dari sisi intertekstualitas, Supersemar terhubung erat dengan teks politik lain, membentuk rantai wacana (*chain of discourse*) yang memindahkan otoritas. Selain pidato Soekarno, Nawaksara (1966) yang menyerukan stabilitas, ada maklumat pembubaran PKI (1966) yang mbingkai komunisme sebagai ancaman, dan surat keputusan pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden (1967) yang mengukuhkan pergeseran. Wodak (2001) menekankan intertekstualitas sebagai jaringan genre, di mana bahasa birokratis menginstitutionalisasi perubahan tanpa kekerasan eksplisit. Untuk memperkaya, tambahkan hubungan dengan teks sebelumnya seperti Deklarasi Ekonomi (1963) Soekarno, yang menunjukkan ketegangan ekonomi-politik, atau laporan militer tentang G30S yang mbingkai PKI sebagai musuh. Ini menciptakan narasi kumulatif: Supersemar sebagai "link" yang menghubungkan krisis ke solusi militer, mirip dengan intertekstualitas dalam wacana kolonialisme yang Wodak analisis dalam studi tentang Austria pasca-Perang Dunia II.

Analisis terhadap teks *Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)* dalam kerangka *Discourse-Historical Approach* Ruth Wodak menunjukkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dijalankan melalui tindakan politik yang kasat mata, melainkan juga melalui konstruksi wacana yang memproduksi makna tertentu tentang legitimasi, otoritas, dan kepatuhan. Dalam konteks ini, wacana berperan sebagai mekanisme ideologis yang menyamarkan hubungan dominasi di balik bentuk bahasa yang tampak formal dan netral. Representasi kekuasaan dalam Supersemar dibangun melalui tiga lapis strategi wacana: *framing* yang menampilkan perintah sebagai tindakan administratif, *intertekstualitas* yang mengaitkan teks dengan dokumen politik lain untuk meneguhkan legitimasi, dan *strategic ambiguity* yang memberikan ruang interpretasi luas bagi pelaksana mandat. Ketiganya bersinergi menciptakan ilusi kesepahaman antara pemberi dan penerima perintah, padahal secara implisit terjadi negosiasi kuasa yang menentukan arah sejarah politik Indonesia.

Dalam pandangan Wodak (2001), praktik seperti ini merupakan bentuk *discursive legitimation* proses di mana kekuasaan dilegalkan bukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui penerimaan sosial terhadap makna yang diproduksi oleh teks. Supersemar, dengan bahasa resminya yang kaku namun terbuka, berhasil menggeser persepsi publik dari konflik politik menjadi tindakan penyelamatan negara. Perubahan persepsi inilah yang kemudian menormalisasi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto sebagai sesuatu yang sah, bahkan perlu.

Secara ideologis, hal ini menunjukkan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga aktif membentuknya. Bahasa yang digunakan dalam Supersemar merepresentasikan kekuasaan sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab nasional, bukan sebagai dominasi politik. Dengan kata lain, kekuasaan direpresentasikan bukan dalam bentuk pemaksaan, melainkan dalam bentuk rasionalitas birokratis dan moralitas kolektif. Dari sudut pandang analisis wacana kritis, implikasi ini memperlihatkan betapa efektifnya bahasa dalam membangun hegemoni. Melalui kombinasi antara legitimasi moral, simbolik, dan historis, teks seperti Supersemar berfungsi sebagai *discursive artifact* artefak kebahasaan yang tidak hanya menyimpan makna masa lalu, tetapi juga terus membentuk pemaknaan kekuasaan hingga kini. Representasi kekuasaan dalam Supersemar menegaskan bahwa setiap teks politik memiliki potensi ideologis untuk mempengaruhi cara masyarakat memahami, menerima, atau menolak suatu rezim. Analisis wacana kritis model Wodak melihat bahwa di balik kalimat perintah yang tampak sederhana, terdapat kompleksitas makna yang mengatur siapa yang berhak memerintah, siapa yang harus taat, dan bagaimana kekuasaan dijustifikasi dalam bahasa yang seolah netral.

Keterkaitan Supersemar dengan konteks sosial-politik memperkuat fungsinya sebagai alat legitimasi. Pasca-G30S, ketidakstabilan ditandai inflasi tinggi, polarisasi NASAKOM, dan tekanan internasional menciptakan kebutuhan figur otoritatif. Framing teks sebagai mandat moral beroperasi sebagai *discursive legitimation* (legitimasi diskursif), menormalkan kekuasaan Soeharto melalui wacana kepatuhan dan stabilitas. Wodak (2009) melihat ini sebagai reproduksi ideologi, di mana bahasa membentuk konsensus sosial. Untuk memperkaya, tambahkan konteks global: Dukungan AS melalui CIA dan program bantuan ekonomi (seperti PL-480) mbingkai anti-komunisme sebagai penyelamatan demokrasi, sehingga Supersemar menjadi bagian dari wacana Cold War. Ini menunjukkan bagaimana legitimasi bukan hanya lokal, melainkan terpengaruh oleh interaksi global, seperti yang dijelaskan Wodak dalam analisis wacana tentang Uni Eropa.

Secara kritis, DHA Wodak mengungkap legitimasi Supersemar sebagai konstruksi diskursif berlapis, di mana framing sebagai penyelamatan dan intertekstualitas dengan dokumen lain menjadikan bahasa sebagai sarana dominasi halus namun efektif. Supersemar berfungsi sebagai *text of transition*, mengubah pelaksanaan mandat menjadi pengalihan kekuasaan. Untuk memperkaya, tambahkan implikasi modern: Analisis ini relevan untuk

wacana politik digital Indonesia, seperti framing dalam kampanye politik atau hoaks, di mana intertekstualitas dengan media sosial memperkuat legitimasi. Wodak menyarankan triangulasi data untuk validitas, sehingga penelitian Supersemar bisa melibatkan arsip dan wawancara untuk menghindari bias interpretatif. Dengan demikian, Supersemar bukan hanya saksi sejarah, melainkan pembentuknya melalui kekuatan wacana.

3.6. Implikasi dan Interpretasi Kekuasaan dalam Teks; Dampak Bahasa Terhadap Persepsi Penerima Pesan, Bagaimana Teks Mempertahankan atau Menegaskan Legitimasi Kekuasaan

Analisis terhadap teks Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) melalui pendekatan Discourse-Historical Approach (DHA) menunjukkan bahwa kekuasaan dalam wacana tidak semata dijalankan melalui perintah eksplisit, tetapi juga melalui konstruksi makna yang membentuk persepsi legitimasi di benak pembaca atau masyarakat. Wodak (2001; 2009) menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan dalam wacana dibangun melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi linguistik, intertekstual, dan sosial-historis. Ketiganya bekerja secara bersamaan untuk menormalisasi tindakan politik tertentu dan menghadirkan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, rasional, serta moral.

Pada dimensi linguistik, Supersemar menampilkan kekuasaan sebagai kewenangan yang sah dan rasional. Pilihan diksi seperti “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dan “menjamin keamanan dan ketertiban” memperlihatkan strategi legitimasi yang menggabungkan urgensi dengan tanggung jawab moral. Bentuk kalimat pasif dan penggunaan kata kerja yang bersifat formal menegaskan citra administratif dan objektif, namun pada saat yang sama menyembunyikan relasi kuasa yang asimetris antara pemberi dan penerima perintah. Dalam pandangan Wodak, bentuk kebahasaan seperti ini merupakan mekanisme legitimasi ideologis, di mana bahasa digunakan untuk menyamarkan dominasi di balik citra rasionalitas dan netralitas birokratis.

Pada dimensi intertekstual, Supersemar berhubungan erat dengan wacana politik dan dokumen lain pada masa peralihan 1966, seperti pidato Nawaksara, maklumat pembubaran Partai Komunis Indonesia, dan Surat Keputusan pengangkatan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa Supersemar tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rantai wacana politik yang membentuk narasi krisis dan penyelamatan negara. Dalam konteks teori Wodak, intertekstualitas berperan penting dalam membangun legitimasi, karena suatu teks memperoleh kekuatannya bukan hanya dari isinya, tetapi juga dari hubungannya dengan wacana yang mendukungnya. Supersemar berfungsi sebagai penghubung antara otoritas simbolik Soekarno dan kekuasaan operasional Soeharto, sehingga memperkuat proses peralihan kekuasaan tanpa memunculkan konfrontasi terbuka.

Pada dimensi sosial-historis, bahasa dalam Supersemar merepresentasikan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral di tengah situasi krisis nasional pasca-G30S/PKI. Melalui framing yang menonjolkan urgensi stabilitas dan keamanan, teks ini menafsirkan tindakan politik sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa. Wodak (2009) menyebut praktik ini sebagai discursive legitimation, yaitu proses pembentukan keabsahan politik melalui penerimaan sosial terhadap makna yang diproduksi oleh teks. Dengan kata lain, legitimasi Soeharto tidak hanya diperoleh dari isi surat itu sendiri, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap wacana yang memosisikan tindakan militer sebagai penyelamatan revolusi.

Secara ideologis, implikasi dari representasi ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa kekuasaan Soeharto muncul secara alami, bukan sebagai hasil perebutan politik. Teks Supersemar, dengan gaya bahasa yang netral dan formal, berhasil mengubah pemindahan otoritas menjadi tindakan administratif yang tampak sah. Inilah bentuk reproduksi ideologi yang dimaksud Wodak (2001), di mana bahasa tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga membentuk dan mempertahankannya. Melalui strategi kebahasaan yang terukur, teks ini menciptakan citra stabilitas dan kepatuhan, sekaligus meniadakan potensi oposisi terhadap kekuasaan baru.

Dengan demikian, implikasi kekuasaan dalam teks Supersemar bersifat ganda. Di satu sisi, teks ini berperan sebagai alat legitimasi yang meneguhkan wibawa negara dan menormalkan peralihan kekuasaan. Di sisi lain, teks ini menjadi mekanisme ideologis yang memproduksi konsensus sosial melalui wacana tanggung jawab, moralitas, dan penyelamatan nasional. Interpretasi terhadap Supersemar melalui kerangka Ruth Wodak menegaskan bahwa kekuasaan dalam wacana politik tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan, tetapi juga melalui bahasa yang halus, formal, dan diterima sebagai kebenaran sosial. Oleh karena itu, Supersemar dapat dipahami sebagai artefak kebahasaan yang memperlihatkan bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui praktik diskursif yang terhubung erat dengan konteks historis dan ideologis zamannya.

4. Kesimpulan

Analisis terhadap teks Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dengan menggunakan pendekatan Discourse-Historical Approach (DHA) Ruth Wodak menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya dimanifestasikan melalui tindakan politik, tetapi juga melalui konstruksi bahasa yang membentuk legitimasi ideologis. Teks Supersemar berfungsi sebagai wacana politik yang menegaskan peralihan otoritas dari Soekarno kepada Soeharto melalui strategi linguistik yang sistematis, kontekstual, dan sarat makna sosial-historis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa representasi kekuasaan dalam teks ini dibangun melalui beberapa strategi utama, yaitu penamaan, penggambaran, argumentasi, perspektivisasi, serta intensifikasi dan mitigasi. Strategi penamaan digunakan untuk menampilkan aktor sosial sebagai institusi formal, bukan individu personal, sehingga memperkuat citra objektivitas kekuasaan negara. Strategi penggambaran dan argumentasi memperlihatkan pembentukan citra Soeharto sebagai pelaksana tanggung jawab moral dan Soekarno sebagai sumber legitimasi yang memberi kepercayaan. Sementara itu, strategi perspektivisasi dan mitigasi menampilkan wacana kekuasaan yang netral dan administratif, tetapi secara implisit mengandung ambiguitas yang membuka ruang tafsir luas terhadap pelimpahan wewenang. Dari segi implikasi, teks Supersemar membentuk persepsi sosial bahwa peralihan kekuasaan merupakan tindakan rasional dan moral demi keselamatan bangsa. Melalui intertekstualitas dengan dokumen dan wacana politik lain pada masa itu, Supersemar memperkuat narasi stabilitas nasional dan menjadi instrumen ideologis bagi legitimasi rezim Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa berperan aktif dalam membangun realitas politik, di mana legitimasi kekuasaan diperoleh bukan hanya dari tindakan politik, tetapi juga dari penerimaan sosial terhadap makna yang diproduksi oleh wacana. Dengan demikian, Supersemar dapat dipahami sebagai artefak diskursif yang menampilkan kekuasaan sebagai konstruksi sosial dan ideologis. Melalui bahasa yang tampak formal dan netral, teks ini berhasil melegitimasi transisi politik serta menormalkan struktur kekuasaan baru. Pendekatan Ruth Wodak memungkinkan pemahaman mendalam bahwa di balik kalimat perintah yang sederhana, terdapat mekanisme wacana yang kompleks dalam membentuk dan mempertahankan kekuasaan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis, khususnya model Wodak, memiliki relevansi tinggi untuk mengungkap hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan dalam konteks sejarah politik Indonesia.

Referensi

1. Anam, Y., Yumna, A., & Miftahulhairah, A. (2023). *Relasi Kuasa pada Toponimi Nama Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat: Analisis Wacana Kritis Model Ruth Wodak*. *Jurnal Linguistik Gramatika*, 9(2), 45–56.
2. Amin, M. F. (2014). Bahasa dan ideologi: mengungkap ideologi dan kekuasaan simbolik di balik penggunaan bahasa (kajian teks media melalui analisis wacana kritis). *HUMANIKA*, 19(1), 42-58.
3. Crouch, H. (1985). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
4. Dwi Pangga, M. R., Botifar, M., & Ningtyas, A. R. (2024). *Nilai-Nilai Perjuangan Buya Hamka (Analisis Wacana Kritis Wodak Dalam Film Buya Hamka)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
5. Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
6. Kuntarto, E. (2018). Bahasa dan Kekuasaan Politik Oposan di Indonesia: Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kiprah*, 6(2), 37-47.
7. Maharani, R., Aulia, S., & Handoko, B. (2024). *Dominasi Kekuasaan pada Film Pendek "Please Be Quiet" Karya William Adiguna: Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak*. *Jurnal HIKON*, 5(1), 22–35.
8. Naufal, A., Nurhadi, S., & Anshori, M. (2021). *Kadrun, KPK, dan Buzzer di Lingkungan Tempo: Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 21(2), 105–118.
9. Purwoko, H. (2019). *Bahasa dan Kekuasaan dalam Wacana Politik Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
10. Rahma, R., Mahmudah, A., Sultan, R., Amir, S., & Saleh, M. (2025). *Ideologi dalam Konten TikTok Gen Z: Analisis Wacana Kritis Model Ruth Wodak*. *Jurnal IdeGuru*, 12(1), 88–102.
11. Reisigl, M., & Wodak, R. (2009). *The Discourse-Historical Approach (DHA)*. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis* (pp. 87–121). London: Sage.
12. Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
13. Suharyo, S., Surono, S., & Amin, M. F. (2015). Representasi Ideologi dan Kekuasaan dalam Bahasa: Kajian Teks Media. *HUMANIKA*, 22(2), 92-102.
14. Wodak, R. (2001). *The Discourse-Historical Approach to Discourse Analysis*. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), *Methods of Critical Discourse Analysis*. London: Sage.
15. Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies* (3rd ed.). London: Sage.